

Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018  
Provinsi Sumatera Barat

OPD : BIRO HUKUM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>2.845.541.344</b>
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>			<b>2.845.541.344</b>
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>295.751.450</b>
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat	12 bulan	3.000.000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum	12 bulan	3.000.000
	3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah	1 unit	6.000.000
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum	12 bulan	17.117.450
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan Biro Hukum	12 bulan	28.154.000
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum	12 bulan	18.900.000
	7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	12 bulan	4.200.000
	8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat	12 bulan	215.380.000
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	<b>97.914.000</b>
		<b>Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)</b>	<b>Hijau</b>	
	1 Pengadaan Meubelur	Tersedianya sarana penyimpanan dokumen SKPD	3 unit	15.000.000
	2 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya sarana/peralatan kerja aparatur	6 unit	33.000.000
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dan motor dinas/operasional	3 unit	15.000.000
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum	6 unit	1.950.000
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	8 unit	4.550.000
	6 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset SKPD	12 bulan	28.414.000
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat</b>	<b>15 jpl/org/ tahun</b>	<b>47.721.000</b>
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	1 tahun	47.721.000
IV	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>103.430.529</b>
		<b>Nilai Evaluasi SAKIP SKPD</b>	<b>BB</b>	
		<b>Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan</b>	<b>100%</b>	
		<b>Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD</b>	<b>100%</b>	
		<b>Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD</b>	<b>100%</b>	
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	12 bulan	10.516.644
	2 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	12 bulan	8.658.500
	3 Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	84.255.385

10/30/17

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
V	<b>Program Pembangunan Materi Hukum</b>	<b>Persentase produk hukum provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum</b>	15	1.014.894.365
	1 Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan Perda	15 Perda, 85 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	663.500.665
	2 Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional dan terlaksananya Rakor	15 Draft Ranperda, 85 Draft Pergub, 750 Keputusan Gubernur	168.679.500
	3 Penyusunan Propem Perda Provinsi	Terlaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi	Daftar Propem Perda	116.258.000
	4 Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	Terlaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	15 Perda, dan 85 Pergub	66.456.200
VI	<b>Program Peningkatan Budaya Hukum</b>	<b>Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat</b>	50	50.000.000
	1 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	50 orang peserta	50.000.000
VII	<b>Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM</b>	<b>Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani</b>	4	394.873.000
	1 Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Terlaksananya penanganan kasus di Pengadilan	Penyelesaian 4 perkara	207.626.000
	2 Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparatur yang mampu menangani kasus-kasus hukum	50 orang peserta	-
	3 Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Terselurnya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	Bantuan advokasi sebanyak 6 perkara	65.247.000
	4 Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi laporan/data HAM dan produk hukum bersperspektif HAM	Laporan RANHAM	51.000.000
	5 Rapat Koordinasi Pemmasalahan Hukum dilingkup Provinsi dan Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	50 orang peserta	71.000.000
VIII	<b>Program Sarana dan Informasi Hukum</b>	<b>Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dapat diakses pada perpustakaan dan portal website JDIH</b>	100	132.272.000
	1 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terkelolanya SJDIIH dan kemudahan pengaksesan informasi dan produk hukum daerah	300 buku	132.272.000
	2 Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola SJDIIH	4 Orang	-
	3 Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	Tersebarinya informasi berbagai peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi kegiatannya dengan sosialisasi	2 kali X 50 Orang	-
IX	<b>Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan</b>	<b>Persentase rekomendasi kajian materi/substansi Perda Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota</b>	115	708.685.000
	1 Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	Terlaksananya fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	55 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	202.355.000
	2 Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya klarifikasi dalam rangka pengawasan peraturan daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	30 Perda Kab./Kota	202.662.000
	3 Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota	Terlaksananya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan Kepala Daerah dan DPRD kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	30 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota	203.668.000

28/30/17